

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN  
DASAR DI KABUPATEN PINRANG**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**Untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

**Departemen Ilmu Pemerintahan**



**Oleh :**

**Imam kartiwan Hamzah**

**E051181021**

**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN  
DASAR DI KABUPATEN PINRANG**

Yang diajukan oleh :

Imam Kartiwan Hamzah

E051181021

Telah dipertahankan di depan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanddin.

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

  
Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si

NIP. 196407271991031001

NIP. 196804112000121001

Mengetahui

Ketua departemen

Ilmu pemerintahan



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 196407271991031001

**LEMBAR PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMERATAAN  
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PINRANG”**

Disusun dan diajukan oleh:

**IMAM KARTIWAN HAMZAH**

**E051181021**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, Desember 2022

Menyetujui:

**PANITIA UJIAN:**

Ketua	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.	(  )
Sekretaris	: Irwan Ade Saputra, S.IP. M,Si	(  )
Anggota	: Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos M.Si	(  )
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si	(  )
Pembimbing Utama	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	(  )
Pembimbing Pendamping	: Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si	(  )

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM KARTIWAN HAMZAH

Nim : E051181021

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PINRANG”**

Merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Apabila dikemudian hari, karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 6 Desember 2022

Yang Menyatakan



(Imam Kartiwan Hamzah)

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PINRANG”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, semoga Allah SWT memberikan balasannya. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan keterlibatan dari berbagai pihak. Karena itu, secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua saya Ayahanda Ir. Hamzah Sanempa. S.P dan Ibunda Eka Wahyuli Nur yang telah memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Serta kepada saudari saya, Siti Fatimah Az-zahra yang telah memberikan doa dan dukungan agar penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin beserta jajaran wakil rektor, direktorat dan biro di lingkungan kerja Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil Sukri, S.IP. M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah menyediakan fasilitas dan layanan yang sangat baik.
4. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin sekaligus bertindak sebagai Pembimbing 1 (Utama) dan tim penguji yang telah

memberikan bimbingan dan masukan selama penyelesaian skripsi penulis.

5. Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si selaku sekretaris Departemen Ilmu Pemerintahan dan bertindak sebagai penguji yang telah memberikan saran dan kritik kepada penulis demi perbaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos M.Si Selaku Pembimbing 2 (Pendamping) dan bertindak selaku tim penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
7. Bapak Irwan Ade Saputra, S.IP. M,Si selaku tim penguji yang telah memberikan masukan serta saran kepada penulis agar penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
8. Seluruh bapak dan ibu dosen/tenaga pengajar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala pengorbanan dan jasmu, memberikan ilmu pengetahuan dan nasihat kehidupan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan.
9. Seluruh staf administrasi di lingkungan kerja Universitas Hasanuddin, FISIP Universitas Hsanuddin dan Departemen Ilmu Pemerintahan yang selalu sigap dalam memberikan layanan urusan administrasi penulis untuk proses perkuliahan, penelitian, dan non-akademik.
10. Seluruh pihak informan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan proses penelitian untuk tugas akhir penulis.
11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman RB BOPENG atas segala kekeluargaan yang luar biasa selama ini dan telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
12. Seluruh teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 "ELEFThERIA" dan sahabat seperjuangan "Minderheit" yang telah senantiasa bekerja sama dan tiada henti untuk memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir penulis.
13. Seluruh pihak SDN 8 Pinrang, SMPN 2 Pinrang, dan SMAN 1 Pinrang atas ilmu dan dukungannya selama ini.
14. Seluruh teman-teman KKN Pinrang Gelombang 107 Universitas Hasanuddin atas kekeluargaan yang sangat luar biasa selama proses KKN berlangsung.
15. Rasa terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta atas segala bantuan, doa dan dukungan selama ini.
16. Semua pihak tanpa terkecuali yang selalu terlibat dalam memberikan bantuan selama ini demi kelancaran penyelesaian tugas akhir penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan tugas akhir ini. Atas itu pula penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekeliruan. Atas dasar itu pula penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun dari seluruh pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Makassar, 6 Desember 2022

Penulis

## ABSTRAK

**IMAM KARTIWAN HAMZAH**, Nomor pokok E051181021 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Menyusun skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemerataan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pinrang” dibawah bimbingan **Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. dan Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos M.Si .**

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pemerataan pendidikan dasar di kabupaten pinrang . penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, dalam hal ini pemerataan pendidikan dasar di kabupaten pinrang. subjek penelitian ini adalah kepala dinas pendidikan kabupaten pinrang, kepala bidang pendidikan dasar dinas pendidikan dan kebudayaan, serta beberapa kepala sekolah yang ada di kabupaten pinrang. teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi serta studi pustaka, kemudian data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

penelitian ini menghasilkan beberapa luaran, yang pertama yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan dasar di kabupaten pinrang, yang dimana diketahui masih banyaknya kesenjangan yang terjadi antara sekolah di perkotaan dengan yang ada di pelosok desa. yang kedua, yaitu apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pemerataan pendidikan di kabupaten pinrang, seperti masih sulitnya akses pemerintah daerah dalam menjangkau sekolah yang ada di pelosok desa, serta masih banyaknya sekolah yang kurang dalam mendapatkan media belajar dan sarana prasarana pendukung pendidikan. kemudian bagaimana program pemerintah daerah dalam meningkatkan pendidikan dasar di kabupaten pinrang, seperti program peningkatan kesejahteraan guru yang masih kurang dalam mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. juga ada program penjaminan layanan pendidikan dasar (usia 7-15 tahun) agar seluruh masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan jaminan untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. dan juga tentang program sistem zonasi yang bertujuan agar tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah yang ada di pelosok desa dan perkotaan.

kata kunci : pendidikan dasar, pemerataan, peran

## **ABSTRAC**

IMAM KARTIWAN HAMZAH, Principal number E051181021 Government Science Study Program, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University Prepared a thesis entitled "The Role of Local Government in Equity Basic Education in Pinrang District" under the guidance of Dr. H. A. M. Rusli, M.Sc. and Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos M.Sc.

This study aims to find out how the government's role in the distribution of basic education in Pinrang district. This research uses a qualitative approach with a case study type, in this case the distribution of basic education in Pinrang district. The subjects of this study were the head of the Pinrang district education office, the head of basic education at the education and culture office, as well as several school principals in Pinrang district. data collection techniques in this study using observation techniques, interviews, documentation, and literature study. As for the data collection techniques used in this study, namely observation, interviews, documentation and literature study, then the data were analyzed through data reduction, data presentation, and data verification.

This research produced several outputs, the first of which is about how basic education is implemented in Pinrang district, where it is known that there are still many gaps between schools in urban areas and those in remote villages. the second, namely what are the supporting and inhibiting factors in the distribution of education in Pinrang district, such as the difficulty for local government access to reach schools in remote villages, and the number of schools that lack learning media and educational supporting infrastructure. then what about local government programs in improving basic education in Pinrang district, such as programs to improve teacher welfare which are still lacking in getting the attention of local governments. There is also a guarantee program for basic education services (age 7-15 years) so that the whole community, without exception, is guaranteed access to basic education services. and also about the zoning system program which aims to no longer have gaps between schools in remote villages and urban areas.

keywords: basic education, equity, role

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Konsep Peran.....	16
2.2 Konsep Pemerintah .....	20
2.3 Konsep Pemerintah Daerah.....	23
2.4 Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Pinrang.....	27
2.4.1 Konsep Pemerataan Pendidikan .....	27
2.5 Profil Kabupaten Pinrang .....	28
2.5.1 Letak Geografis Kabupaten Pinrang.....	28
2.5.2 Kondisi Penduduk .....	34
2.5.3 Visi dan Misi Kabupaten Pinrang.....	35
2.6 Konsep Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (DIKBUD) .	36
2.6.1 Tugas dan Fungsi DIKBUD .....	36
2.6.2 Visi dan Misi DIKBUD.....	37
2.6.3 Kerangka Pikir.....	39

BAB 3 METODE PENELITIAN .....	42
A. Fokus Penelitian .....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Informan Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Jenis Data.....	47
F. Analisis Data.....	47
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	49
4.2 Tugas Pokok dan Fungsi DIKBUD .....	50
4.3 Peran Pemerintah Daerah dalam Pemerataan Pendidikan	55
4.3.1 Penyediaan Penjaminan Pendidikan .....	60
4.3.2 Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan .....	64
4.3.3 Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu dan Merata.....	68
4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat.....	71
4.4.1 Faktor Pendukung Pemerataan Pendidikan.....	72
4.4.2 Faktor Penghambat Pemerataan Pendidikan .....	76
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....	83
5.1 Kesimpulan .....	83
5.2 Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN.....	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Rekap Status Sekolah Dasar (SD) .....	62
Tabel 2 Rekap Status Sekolah Menengah Pertama (SMP) .....	63
Tabel 3 Data Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) .....	66
Tabel 4 Data Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) .....	67
Tabel 5 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) .....	69
Tabel 6 Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) ...	70
Tabel 7 Siswa SD/SMP Peraih Prestasi .....	75

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu negara untuk unggul dalam persaingan global. Pendidikan dianggap sebagai bidang yang paling strategis untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan berkarakter merupakan prasyarat terbentuknya peradaban yang tinggi. Sebaliknya, SDM yang rendah akan menghasilkan peradaban yang kurang baik pula.

Urusan pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah pusat yang selanjutnya dikelola oleh masing-masing daerah di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan Pemerintah (Kementrian Pendidikan) dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang untuk berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi terdapat perbedaan urusan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah yaitu dari cakupan tugas yang lebih luas dan lebih banyak untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

dibandingkan Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang, pada Dinas Pendidikan Provinsi mempunyai tugas mencakup pembantuan urusan pendidikan, pengawasan, penyusunan program pendidikan daerahnya, menyusun strategi, perumusan kebijakan Pendidikan hingga memberikan layanan umum dalam hal Pendidikan. Dinas Pendidikan provinsi juga menjadi Pembina dan pemberi izin sekolah dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga lembaga bimbingan belajar (BIMBEL). Sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang mempunyai tugas seperti yang tercantum pada Perda No. 19 Tahun 2008 yaitu melaksanakan Sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, untuk mewujudkan sistem pendidikan yang merata dan bermutu perlu adanya kerjasama pengaturan yang dilakukan oleh pusat dan masing-masing daerah otonom, karena pada dasarnya setiap daerah memiliki kemampuan dan akses yang berbeda sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat menganut sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar. Pendidikan dasar disebut sekolah dasar (SD) yaitu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan sebagai dasar untuk mempersiapkan siswanya yang dapat ataupun tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, untuk menjadi warga negara yang baik. berikut pengertian pendidikan dasar termaktub Dalam undang – undang sistem pendidikan nasional bab VI pasal 17 menyebutkan:

- Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat. Dalam pendidikan ini akan

terjadi peletakan dasar dari pembangunan manusia. Esensi pendidikan yang dialami oleh manusia pada permulaan hidup lebih ditekankan pada fakta dan membaca fakta – fakta dalam pergelaran obyektifitas di alam ini. Maka dalam pendidikan dasar, orang tua tidak boleh bertengkar atau berbuat apa saja yang belum pantas diketahui oleh anak, sebab hal itu akan merusak sistem dan suasana hati yang sedang dibangun, karena alam ini tertib, maka rumah tangga serta lingkungannya harus tertib.

Kualitas pendidikan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara berkembang yang lainnya. Meskipun ada beberapa poin yang tertinggal, namun bukan berarti Pendidikan di negara kepulauan ini tidak baik. Dan juga pelajar di Indonesia tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membayar fasilitas sekolah. Di Indonesia, biaya pendidikan telah ditanggung oleh negara. Hal ini pendapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20% dialokasikan untuk pendidikan. Jumlah anggaran tersebut bertujuan untuk mewujudkan salah satu visi negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada APBN 2018, pemerintah Indonesia mengalokasikan kurang lebih Rp 444,131 triliun untuk Pendidikan. Angka tersebut sebanding dengan total seluruh anggaran sebesar Rp 2.200 triliun.

Prosentase 20% tersebut telah sesuai dengan Lampiran XIX Perpres tahun anggaran 2018.

Anggaran yang tertera di atas terdiri atas Anggaran Pendidikan melalui Pelanja pemerintah Pusat sebesar Rp 149,680 triliun, Anggaran Pendidikan melalui transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 279,450 triliun, dan Anggaran Pendidikan melalui pembiayaan sebesar Rp 15 triliun.

Saat ini pemerintah sedang gencar untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Istilah daerah terpencil akan ditiadakan. Semua sekolah akan difasilitasi pemerintah pusat maupun daerah. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 pada ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Bahkan dengan adanya sistem zonasi beberapa tahun terakhir ini, tidak akan ada lagi yang namanya “sekolah favorit”. Semua sekolah negeri memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Jika beberapa tahun yang lalu peserta didik berbondong-bondong untuk memilih sekolah yang menurut mereka unggul prestasi. Sekarang tidak bias semudah itu lagi. Misalnya saja di jenjang sekolah dasar. Penerimaan peserta didik sudah dilaksanakan secara *online*. Penerimaan peserta didik dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi dan usia. Tidak ada syarat yang

mewajibkan calon peserta didik tersebut harus berasal dari Taman Kanak-Kanak.

Begitu pula dengan sistem penerimaan peserta didik di SMP. Zonasi menjadi pertimbangan utama. Bukan nilai ujian maupun usia peserta didik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 tahun 2017 pasal 15 ayat (1) Bahwa sistem zonasi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari total keseluruhan peserta didik yang diterima. Hal ini mendorong sekolah negeri untuk sama-sama memperhatikan kualitas sekolah demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan sistem ini, semua siswa yang mendaftar dipastikan dapat bersekolah dekat dengan tempat tinggal mereka. Apalagi dengan adanya dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), sekolah tidak diperkenankan menarik iuran dari wali murid. Kalua pun dana alokasi yang diberikan oleh sekolah masing kurang, maka yang berhak meminta kekurangan dana kepada wali murid adalah “komite sekolah” bukan “guru”.

Menurut hasil penelitian Bank Dunia, sistem pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-3 sebagai sistem Pendidikan terbesar di Asia ke-4 terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan

yang dipisahkan oleh lautan, guru Indonesia memang harus siap ditempatkan di mana saja.

Jika dibandingkan negara lain, penetapan kurikulum Indonesia memang tidak mudah. Pasalnya, pemerintah harus membuat perencanaan terbaik dalam mengatasi ribuan keanekaragaman. Selain terpisah oleh lautan, Indonesia juga memiliki corak budaya yang berbeda, agama yang heterogen, mata pencaharian yang variatif, serta cara hidup yang tidak sama. Namun dengan diberlakukannya kurikulum nasional Kurikulum 2013, guru diberi langkah lebih lebar untuk bergerak.

Kurikulum 2013 memang telah menentukan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Buku Guru dan Buku Siswa. Namun hal itu bukan berarti guru harus mengikuti persis isi buku. Guru dapat membuat indikator sendiri berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. Buku siswa yang menjadi pegangan guru adalah sumber belajar minimal yang masih dapat dikembangkan secara lebih luas.

Di Indonesia, guru memiliki posisi yang berbeda dalam masyarakat. Masyarakat masih memandang guru sebagai profesi yang mulia. Bahkan ada istilah “pahlawan tanpa tanda jasa”. Pernyataan tersebut sangat sesuai karena tugas guru tidak hanya mengajar melainkan juga mendidik anak menjadi pribadi yang mulia dan berakarakter.

Semua lapisan masyarakat sudah menyadari bahwa guru adalah profesi paling penting karena harus mendidik generasi kusuma bangsa. Bahkan dewasa ini profesi guru sangat populer di kalangan anak muda. Banyak lulusan SMA yang mendaftar di program ilmu keguruan dan pendidikan. Kepopuleran jurusan pendidikan telah mengalahkan jurusan kedokteran. Dari jumlah pendaftar yang mengikuti tes, hanya sekitar 15% yang diterima.

Kondisi tersebut sama halnya dengan perekrutan CPNS guru. Formasi guru selalu menempati posisi tertinggi dibandingkan formasi yang lain. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu wilayah, melainkan di semua wilayah. Hal ini tentu sangat bagus karena pemerintah bias mendapatkan guru-guru professional dengan melalui tes yang ketat. Salah jika dianggap guru Indonesia hanya mengajar dengan durasi yang pendek. Pekerjaan guru di Indonesia justru sama panjangnya dengan jam kerja dokter maupun pengacara. Guru bekerja keras mempersiapkan materi, bahan ajar, media, menentukan teknik pembelajaran yang tepat karena setiap siswa memiliki karakter yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan kepakaran dalam menjalankan profesi ini.

Indonesia memiliki sistem pendidikan yang transparan. Artinya, siswa dan orang tua diberikan kebebasan akses. Guru dan siswa berhak tahu hasil belajar mereka serta berhak tahu pula informasi-informasi terkait pembelajaran. Di Indonesia kurikulum

memang diatur oleh pusat melalui keterlibatan para ahli kurikulum dan praktisi. Jadi kurikulum tidak hanya disusun oleh *expert* namun ada pula praktisi (guru) yang ikut terlibat. Contohnya dalam pembuatan buku kurikulum 2013, ada guru yang terlibat di dalamnya melalui seleksi tertentu. Guru yang tercatat dalam pembuatan buku kurikulum 2013 telah melewati seleksi yang cukup panjang. Artinya, pemerintah telah memperhatikan pihak yang terlibat dalam perencanaan pembelajaran.

Guru memiliki peran aktif dalam implementasi kurikulum 2013. Dalam kurikulum baru ini guru tidak hanya menjadi pengajar, tapi guru juga harus bisa menjadi *guide, teach, and explain*. Guru membimbing siswa dalam kegiatan akademik maupun nonakademik. Sudah menjadi tugas seorang guru untuk menggali bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Guru menuntun peserta didik untuk mendapatkan materi-materi yang dibutuhkan dalam menghimpun pengetahuan mereka.

Guru juga dituntut dapat menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan dalam pembelajaran. Sebagai tindak lanjutnya, peserta didik juga harus dapat mempresentasikan kegiatan yang telah mereka dapat selama pembelajaran di sekolah. Peran aktif guru di sini bertujuan agar siswa mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapat di sekolah. Sekolah bukan sekadar mengeluarkan buku kemudian memasukkannya kembali di dalam

tas. Namun sekolah adalah rumah dengan beberapa sekat tanpa pintu. Ada banyak ilmu yang dapat siswa pelajari di sekolah.

Dewasa ini keterlibatan orang tua dan masyarakat juga tampak lebih baik. Adanya program sekolah PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) secara langsung telah melibatkan orang tua di dalam pembelajaran. Sekolah menggandeng orang tua untuk turut menciptakan visi sekolah ramah anak. Di bawah Komite Sekolah dan Paguyuban Antar Kelas, orang tua turut menyumbangkan materiil maupun non materiil demi kelancaran pembelajaran anak-anak mereka.

Berbagai aktivitas dan bantuan yang diberikan orang tua didasarkan dari rasa “memiliki” dan “mengasahi” bahwa keberhasilan Pendidikan adalah bentuk usaha bersama. Kesuksesan anak di dalam pendidikannya bukan hanya tugas guru. Namun orang tua sebagai madrasah pertama juga memiliki peran penting dalam membentuk pribadi anak.

Peran sekolah dalam program Sekolah PPK adalah sebagai jembatan bagi guru dan orang tua dalam menemukan dan mengembangkan bakat siswa. Selama ini banyak sekali anak-anak berbakat yang potensinya tidak dapat tersalurkan karena tidak adanya komunikasi yang baik antara guru, orang tua, dan sekolah. Orang tua tentu mengetahui bakat anak dengan lebih baik

dibandingkan gurunya. Tugas orang tua adalah mengevaluasi perkembangan anak melalui koordinasi dengan guru kelas/wali kelasnya. Melalui evaluasi tersebut guru dan orang tua akan bekerja sama untuk membimbing dan mengarahkan bakat siswa.

Indonesia termasuk negara yang sukses dalam membangun mega sistem Pendidikan untuk menyatukan segala perbedaan karakteristik peserta didik. Belum rata-tanya tingkat pendidikan di Indonesia apalagi jauhnya mutu pendidikan antara di daerah dengan di kota menyebabkan banyak siswa siswi yang berasal dari daerah banyak yang kesulitan mengikuti ujian nasional yang dilakukan secara online. Jika kita cermati hal ini memang sangat mengkhawatirkan apa lagi sarana dan prasarana sekolah yang berada di daerah dan sekolah yang berada di kota sangat jauh sekali perbandingannya. jauh sekali sarana dan prasarana antara sekolah yang berada di daerah terpencil dengan sekolah yang berada di kota kota besar, jadi tidak heran jika mengapa saat ujian nasional banyak sekali siswa siswi yang berasal dari daerah terpencil yang hampir tidak lulus ujian nasional karena dari sarana dan prasarananya saja sudah jauh berbeda, seharusnya pemerintah memperhatikan sekolah-sekolah yang kurang layak sebagai langkah awal menuju pemerataan pendidikan di Indonesia lanjutnya.

Masyarakat telah memberikan masukan bahwa solusi dari permasalahan yang terjadi tersebut salah satunya adalah dengan cara perbaikan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang dibutuhkan di daerah pelosok yang selama ini biasanya jarang tersentuh. Salah satu kuncinya adalah mendorong akses infrastruktur telekomunikasi di desa tersebut. selama ini memang fasilitas penunjang pendidikan di daerah pelosok kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Terutama tidak adanya jaringan Telekomunikasi dan masi minimnya pasokan listrik kemudian masalah banyaknya bangunan sekolah yang tidak layak dipakai lagi karena rusak.

Pemerataan pembangunan di daerah juga sangat penting untuk menanggulangi masalah kurang meratanya pendidikan di Indonesia khususnya di Desa lembang Mesakada, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, Sul- Sel. Kurangnya tenaga pendidik juga merupakan penyebab kurang meratanya pendidikan di Indonesia.

Untuk mengatasinya, pemerintah dapat memberikan penghargaan yang menarik agar memotivasi para guru untuk dapat mengajar di daerah-daerah terpencil. Diharapkan dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut, pendidikan di lembang Mesakada akan menjadi lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Sehingga semua masyarakat

Mesakada dapat memiliki hak yang sama dalam masalah pendidikan agar tidak terjadi lagi masalah kurang meratanya tingkat pendidikan di Indonesia

Bupati pinrang, Irwan Hamid juga telah menjanjikan pemerataan sektor pendidikan di Kabupaten Pinrang pada saat memimpin upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), yang digelar di halaman kantor bupati Pinrang, Kamis (2/5/2019). Irwan Hamid menegaskan, sektor pendidikan merupakan hak semua warga negara hal itu akan menjadi perhatian khususnya sekolah di kawasan pegunungan. Karena, kata dia, sebagian wilayah di Pinrang wilayah pegunungan dan menjadi ganjalan kurangnya tenaga guru yang mau mengabdikan di wilayah tersebut.

Bupati Pinrang juga memastikan bahwa sektor pendidikan di Kabupaten Pinrang, dapat dinikmati secara merata seluruh masyarakat termasuk di wilayah pegunungan terpencil dengan fasilitas dan pelayanan yang sama. .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemerataan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pinrang?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemerataan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pinrang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pemerataan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemerataan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pinrang.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat secara teoritis yang dimana penelitian diharapkan mampu menambah informasi mengenai *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemerataan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pinrang* serta menjadi referensi dalam menambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan.
  
2. Manfaat praktis.
  - a. Peneliti. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi alat tambah wawasan inli pengetahuan terhusus mengenai *Peran Pemerintah daerah dalam Pemerataan Pendidikan Dasar di Kab.Pinrang.* serta menjadi acuan/dasar dalam melakukan penelitian selanjutnya.
  - b. Pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai bagaimana *Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pemerataan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pinrang,* dan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam mengevaluasi Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Pinrang

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Peran**

Apa yang dimaksud dengan peran? Secara umum, pengertian Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran.

Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu:

- Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat.
- Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.

- Peran adalah perilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.

Agar lebih memahami apa itu peran, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini:

Menurut Soekanto (2009), arti peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda.

Menurut Riyadi (2002), pengertian peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal ini di dasari pada individu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Merton peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran adalah sebagai berikut:

➤ Persepsi Peran

Persepsi Peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

➤ Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

➤ Konflik Peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

Secara umum, struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu peran Formal dan Informal. Peran Formal merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, dan lain-lain. Sedangkan

peran Informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

### Jenis-Jenis Peran.

Peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soerjono Soekamto, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

#### 1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

#### 2. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

#### 3. Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

## 2.2 Konsep Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia.

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

1. Mendapat awalan “pe-“ menjadi “Pemerintah” yang berarti badan atau organisasi yang mengurus suatu negara.

2. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi kata “pemerintahan” yang berarti perbuatan cara atau perihal atau urusan dan badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Menurut Napitupulu (2012;9) Pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan Pemerintahan, sedangkan Pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan Pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Sedangkan menurut Ibnu Kencana Syafi'ie (2003:3) Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan memelihara keamanan dan memelihara derajat kehidupan rakyat serta menjamin kepentingan negara itu sendiri. Dan mempunyai fungsi

Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara.

### **Tugas dan Fungsi Pemerintahan**

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama, oleh karena itu, secara umum tugas dan fungsi pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan, sebagai berikut :

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok- gontokan diantara warga masyarakat.
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintahan, atau yang lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintahan.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pada Bab VI tentang Urusan Pemerintahan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Urusan Pemerintahan Absolut, Pemerintahan Konkuren, dan Pemerintahan Umum.

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi dan moneter dan agama.
2. Urusan pemerintahan konkurent adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

3. Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

### **2.3 Konsep Pemerintah Daerah**

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: *pertama* berarti pemerintah lokal, *kedua* berarti pemerintahan lokal, dan *ketiga* berarti wilayah lokal.

Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (*local government* atau *local authority*).

Pemerintahan lokal pada pengertian ketiga menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia. Daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

Tjahja Supriatna (dalam Hanif:2007) yang menyitir pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah:

- a. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara;
- b. Pemerintah daerah diatur oleh hukum;
- c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
- d. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan;
- e. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam

wilayah yurisdiksinya. Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya.

asas pemerintahan daerah yang dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada hakikatnya terdiri dari 3 asas:

1. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan Pemerintahan dari Pusat kepada Daerah-Daerah yang mengurus urusan rumah tangganya sendiri (Daerah-Daerah Otonom). Desentralisasi adalah juga cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan pada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan Negara. Sedangkan menurut Webster Dictionary, diungkapkan bahwa *to decentralize means to divide and distribute as governmental administration, to withdraw from the center or place of concentration* (desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi pemerintahan mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi).

## 2. Asas Dekonsentrasi

Menurut Koesoemahatmaja (dalam Fauzan, 2006:53) dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan, misalnya pelimpahan kekuasaan dari wewenang menteri kepada Gubernur, dari Gubernur kepada Bupati dan seterusnya. Menurut Rondinelli (dalam Koswara, 2002:47) dekonsentrasi pada hakikatnya hanya merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan.

## 3. Asas Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Urusan yang ditugaskan masih menjadi wewenang sepenuhnya Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi (yang menugaskannya). Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi memberi tugas menyusun rencana kegiatan atau kebijaksanaan dan menyediakan anggarannya, sedang Daerah (dalam hal ini Kabupaten dan Kota) yang ditugasi

hanya sekadar melaksanakannya, tetapi dengan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas itu kepada yang memberi tugas. Urusan-urusan yang pelaksanaannya didasarkan pada asas tugas pembantuan ini, antara lain sebagian urusan haji, urusan bencana alam, lingkungan hidup, olahraga, kepemudaan.

Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## **2.4 Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Pinrang.**

### **2.4.1 Konsep Pemerataan Pendidikan**

Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, maka harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang (*planning*).

Perluasan pendidikan lebih menekankan bagaimana upaya pemerintah untuk mengadakan sarana dan prasarana pendidikan, kemudian penyediaan sarana dan prasarana tersebut mencapai

seluruh pelosok nusantara atau daerah-daerah terpencil. Pemerataan pendidikan memiliki arti yang lebih menekankan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama di dalam mengakses pendidikan. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara si miskin dan si kaya, demikian juga tidak terdapat perbedaan antara masyarakat kota dan masyarakat desa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan Pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan Pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan Pendidikan.

## **2.5 Profil Kabupaten Pinrang**

### **2.5.1 Letak geografis Kabupaten Pinrang**

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pinrang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961,77 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak ± 351.118 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 171 jiwa/km<sup>2</sup>, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Patinjo. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten Pinrang terletak pada Koordinat antara 43°10'30" - 30°19'13" Lintang Utara dan 119°26'30"

- 119°47'20" Bujur Timur. Jarak tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten Pinrang ± 173 km dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Selatan : Kota Pare-pare
- Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap
- Sebelah Barat : Selat Makassar dan Kabupaten Polmas

Wilayah Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan terbagi atas 39 kelurahan dan 65 Desa. Kondisi Topografi wilayah pada umumnya berbukit-bukit dengan ketinggian 100 – 2000 meter di atas permukaan laut.

Tipe Iklim di wilayah ini termasuk tipe B dan C dimana musim hujan terjadi pada Bulan November hingga Juni dan sebaliknya musim kemarau terjadi pada Bulan Agustus hingga Bulan September, secara umum curah hujan terjadi cukup tinggi dan sangat dipengaruhi angin musiman. Suhu udara rata-rata mencapai 28°C dengan curah hujan rata-rata mencapai 174,93 mm/bln

Ada beberapa versi mengenai asal muasal pemberian nama **Pinrang** yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. Versi yang pertama menyebut bahwa Pinrang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata "*benrang*" yang berarti "air genangan" bisa juga berarti "rawa-rawa". Hal ini disebabkan oleh karena pada awal

pembukaan daerah Pinrang yang tepatnya saat ini di pusat kota kabupaten Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa.

Versi kedua menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh karena suatu ketika Raja Sawitto yang bernama **La Paleteang**, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa berkat bantuan *To barani pole' Kassa* disambut gembira oleh rakyatnya, namun mereka terheran-heran karena wajah sang raja berubah dan mereka berkata "*Pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa*", yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa. Maka setelah itu rakyat mulai menyebut daerah tersebut sebagai *Pinra* yang artinya berubah, dikemudian hari masyarakat setempat mengubah penyebutan tersebut menjadi Pinrang. Tersebutlah suatu peristiwa di Sawitto pada waktu pemerintahan La Paleteang Raja IV, di Kerajaan Sawitto, Sulawesi. Pada waktu itu terjadi peperangan antara Sawitto dan Gowa. Perang ini terjadi karena Gowa sebagai kerajaan besar, berusaha untuk menguasai Sawitto yang kondisi dan potensinya menjanjikan setumpuk harapan. Berbagai upaya yang telah digunakan Gowa untuk menguasai Sawitto melalui agresi dan terjadilah perang antara Sawitto dan Gowa sekitar tahun 1540. Prajurit-prajurit Sawitto dengan gigih mengadakan perlawanan abdi kerajaan mati-matian mempertahankan dan membela bumi ini berkesudahan dengan kekalahan dipihak Sawitto sehingga raja La

Paleteang dan isterinya dibawa ke Gowa sebagai tanda kemenangan Gowa atas Sawitto. Awan meliputi kesedihan rakyat atas kepergian sang raja yang arif dan bijaksana. Berbagai dilakukan membebaskan sang raja bersama permaisuri kerajaan Sawitto. Akhirnya dalam suatu musyawarah kerajaan terpilih dua Tobarani, yaitu Tolengo dan To Kipa untuk mengemban tugas membebaskan sang raja beserta permaisurinya. Kemudian berangkatlah kedua bersaudara tersebut ke Gowa yang berhasil membawa pulang raja La Paleteang beserta permaisurnya. Kedatangan raja bersama permaisuri disambut dengan luapan kegembiraan dan di elu-elukan sepanjang jalan menuju istana. Dibalik kegembiraan itu, mereka terharu melihat kondisi sang raja yang mengalami banyak perubahan seraya mengatakan “PINRA KANA NI TAPPA NA DATUE POLE RI GOWA”, yang artinya wajah raja mengalami perubahan sekembali dari Gowa. Kata-kata inilah senantiasa terlontar dari orang-orang yang menyertai sang raja. Ketika raja beristirahat sejenak sebelum tiba di istana bertitahlah sang raja kepada pengantarnya untuk menyebut tempat tersebut dengan nama PINRANG.

Sumber lain ini mengatakan pemukiman kota Pinrang yang dahulunya rawa-rawa yang selalu tergenang air membuat masyarakat senantiasa berpindah-pindah mencari wilayah pemukiman yang bebas genangan air, berpindah-pindah atau berubah-ubah pemukiman dalam bahasa Bugis disebut “PINRA-

PINRA ONROANG”. Setelah masyarakat menemukan tempat pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi nama: PINRA-PINRA. Dari kedua sejarah yang berbeda itu lahirlah istilah yang sama, yaitu “PINRA”, kemudian kata itu dalam perkembangannya dipengaruhi oleh intonasi dan dialek bahasa Bugis sehingga menjadi Pinrang yang sekarang ini diabadikan menjadi nama dari Kabupaten Pinrang.

#### Masa penjajahan

Seorang guru dan dua gadis ningrat dari Bassean, kecamatan Lembang, Pinrang (tahun 1935)

Cikal bakal Kabupaten Pinrang berasal dari *Onder Afdeling* Pinrang yang berada di bawah *afdeling* Pare-Pare, yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi *self bestuur* atau swapraja, yaitu KASSA, BATULAPPA, SAWITTO dan SUPPA yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan *Massenrengpulu* (Kassa dan Batulappa) dan *Ajatappareng* (Suppa dan Sawitto). Hal ini merupakan bagian dari adu domba kolonial untuk memecah persatuan di Sulawesi Selatan. Pemilihan nama Pinrang sebagai nama wilayah dikarenakan daerah Pinrang merupakan tempat berkumpulnya keempat raja tadi dan sekaligus tempat berdirinya *kantoor onder afdelingeen* (kantor residen). Selanjutnya *Onder Afdeling* Pinrang pada zaman

pendudukan Jepang menjadi Bunken Kanrikan Pinrang dan pada zaman kemerdekaan akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang. Sebagaimana diketahui bahwa ketika Jepang masuk di pinrang sekitar tahun 1943, sistem pemerintahan warisan kolonial dengan struktur lengkap yang terdiri dari 4 (empat) swapraja, masing-masing Swapraja Sawitto, Swapraja Batu Lappa, Swapraja Kassa dan Swapraja Suppa. Ketika Pinrang menjadi *Onder Afdeling* di bawah *afdeling* Parepare, sementara *afdeling* Parepare adalah salah satu dari tujuh *afdeling* yang ada di provinsi Sulawesi.

#### Masa Kemerdekaan

Dengan ditetapkannya PP Nomor 34/1952 tentang perubahan daerah Sulawesi Selatan, pembagian wilayahnya menjadi daerah swatantra. Pertimbangan diundangkannya PP tersebut adalah untuk memenuhi keinginan rakyat dan untuk memperbaiki susunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Daerah swatantra yang dibentuk adalah sama dengan wilayah *afdeling* yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur Timur besar (*GROTE GOSTE*) tanggal 24 juni 1940 nomor 21, kemudian diubah oleh Keputusan Gubernur Sulawesi nomor 618/1951. Perubahan adalah kata *afdeling* menjadi daerah swatantra dan *Onder Afdeling* menjadi kewedanaan. Dengan perubahan tersebut maka *Onder Afdeling* Pinrang berubah menjadi kewedanaan Pinrang yang membawahi empat swapraja dan beberapa distrik. Dengan status demikian inilah pemerintahan senantiasa mengalami

pasang surut di tengah-tengah pasang surutnya keadaan pemerintahan. Upaya memperbaiki struktur dan penyelenggaraan pemerintahan di satu sisi, di samping memenuhi kebahagiaan dan keinginan rakyat. Maka, pada tahun 1959 keluarlah undang-undang nomor 29/1959 yang berlaku pada tanggal 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi yang praktis, termasuk membentuk Daerah Tingkat II Pinrang. Namun hal ini belum dapat dijadikan sebagai patokan lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang, berhubung unsur pemerintahannya yang merupakan organ atau bagian yang belum ada.

Pada tanggal 28 Januari 1960, keluar surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 yang menunjuk H.A. MAKKOELAOE menjadi Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, karena pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi. Hal ini kemudian dikaji melalui suatu simposium yang dilakukan oleh kelompok pemuda, khususnya KPMP Kabupaten Pinrang dan diteruskan kepada DPRD untuk dituangkan ke dalam suatu PERDA tersendiri.

### **2.5.2 Kondisi penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sebanyak 372.230 jiwa yang terdiri dari 180.586 jiwa penduduk laki-laki dan 191.644 penduduk perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Watang Sawitto yaitu sebesar 55.972 jiwa Rasio

jenis kelamin (sex ratio) adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Rasio jenis kelamin Kabupaten Pinrang tahun 2017 sebesar 94,2. Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 94 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan penduduk dapat dijadikan salah satu indikator penyebaran penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sekitar 189,7 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Watang Sawitto yaitu sekitar 1.076 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Lembang yaitu sekitar 54 jiwa/km.

### **2.5.3 Visi dan misi Kabupaten Pinrang**

#### **VISI**

Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Penataan Program Pembangunan Pro Rakyat menuju Terciptanya Kawasan Agropolitan yang didukung oleh Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintah.

#### **MISI**

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah yang professional,

2. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian SDA yang berwawasan lingkungan dan memperkuat agribisnis dan agroindustri,
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kemandirian lokal,
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
5. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta infrastruktur terutama pada sektor pertanian.
6. Meningkatkan pengamalan dan nilai-nilai keagamaan, Pancasila dan budaya lokal,
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.

## **2.6 Konsep Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang (DIKBUD).**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan, kebudayaan.

### **2.6.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pinrang**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. Membina dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
4. Mengelola administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
5. Mengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.6.2 Visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.**

Visi :

**“Terwujudnya layanan pendidikan yang merata dan berkualitas guna terciptanya masyarakat cerdas dan sejahtera”**

Strategi memajukan pendidikan yang dimaksud dalam Visi yaitu strategi dengan proses dan mekanisme yang memberikan peluang besar kepada masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan sumber daya manusia.

Misi :

1. Meningkatkan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara dan berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat;
2. Mewujudkan kualitas/mutu dan relevansi pendidikan yang memiliki keunggulan serta memberdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal;
3. Mewujudkan dukungan sustainabilitas (berkelanjutan) lulusan anak didik sekolah menengah pertama kesekolah menengah atas dengan mengembangkan dukungan nyata pembangunan fasilitas pendidikan baru yang variatif dan kreatif;
4. Mewujudkan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur;
5. Mewujudkan kreatifitas, daya saing dan prestasi dibidang Seni dan Budaya;
6. Mewujudkan tata kelola dan tata nilai penyelenggaraan layanan prima pendidikan;
- 7.

### **2.6.3 Kerangka pikir.**

Pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu negara untuk unggul dalam persaingan global. Pendidikan dianggap sebagai bidang yang paling strategis untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan berkarakter merupakan prasyarat terbentuknya peradaban yang tinggi. Sebaliknya, SDM yang rendah akan menghasilkan peradaban yang kurang baik pula. Kualitas pendidikan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara berkembang yang lainnya. Meskipun ada beberapa poin yang tertinggal, namun bukan berarti Pendidikan di negara kepulauan ini tidak baik.

Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, maka harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang (*planning*). Pemerataan pendidikan memiliki arti yang lebih menekankan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama di dalam mengakses pendidikan.

Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemberdayaan/Pemerataan pada bidang Pendidikan di Kabupaten Pinrang.

## BAGAN KERANGKA PIKIR

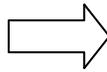
- Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (1) tentang sistem zonasi sekolah.



**Pemerintah Daerah  
(Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan) Kabupaten  
Pinrang**

**Menyediakan Program  
Peningkatan Sektor  
Pendidikan Dasar:**

1. Penyediaan  
Penjaminan Layanan  
Pendidikan Dasar
2. Peningkatan Kualitas  
dan Kesejahteraan Guru
3. Menyelenggarakan  
Pendidikan Yang  
Bermutu dan Merata



**Faktor Pendukung Pemerataan  
Pendidikan :**

- 1.) Peningkatan Prestasi Pelajar di  
Kabupaten Pinrang

**Faktor Penghambat Pemerataan  
Pendidikan :**

- 1.) Akses Jalan ke Daerah Pelosok Desa
- 2.) Media Belajar dan Jaringan  
Telekomunikasi
- 3.) Sarana dan Prasarana Pendukung  
Pendidikan